

**D YANG MENGUASAI PENEBAANGAN HUTAN TANPA IZIN DISERTAI ADANYA
UNSUR PERBARENGAN PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN
HUTAN**

Nama : Timotius Frendiansah

Hukum Tindak Pidana Penguasaan Hutan

Pembimbing:

Elfina Lebrine Sahetapy

Erly Aristo

ABSTRAK

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan bangsa dan negara, keterlibatan negara dalam penataan dan pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan. Undang-Undang tersebut dibuat bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan, letak batasan, dan luas suatu wilayah agar sesuai dengan fungsinya. Penulisan Skripsi ini bertujuan menganalisis apakah D dapat mempertanggungjawabkan tindakannya yang menguasai dan memiliki hasil penebangan hutan tanpa izinsesuai yang diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 menjelaskan beberapa ketentuan yang mengatur tentang tindakan-tindakan subyek hukum dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan seperti diduga membawa alat yang lazim digunakan untuk melakukan penebangan pohon tanpa izin. Dimana tindakan-tindakan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tersebut dapat dilakukan bersamaan. Beberapa tindakan pidana dapat disebut sebagai suatu Gabungan perbuatan yang diatur dalam Pasal 63, Pasal 64 , dan 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat digunakan untuk penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

Kata kunci : Tindak Pidana Penguasaan Hasil Hutan, Tanpa Izin, Perbarengan Pidana

D WHO CONTROLS FOREST LOGGING WITHOUT A PERMIT ACCOMPANIED WITH
THE EXISTENCE OF ELEMENTS OF CRIMINAL CONJUNCTION REVIEWED FROM
LAW NUMBER 18 OF 2013 CONCERNING THE PREVENTION AND ERADICATION OF
FOREST DESTRUCTION

Name : Timotius Frendiansah

Forest Control Criminal Law

Contributor:

Elfina Lebrine Sahetapy

Erly Aristo

ABSTRACT

Forests are natural resources that have strategic value in the development of the nation and state, the involvement of the state in structuring, developing and managing them is very necessary, which is regulated in Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. This law was created with the aim of ensuring legal certainty regarding the status of areas, the location of boundaries and the size of an area so that it is in accordance with its function. The aim of writing this thesis is to analyze whether D can be held accountable for his actions in controlling and owning the results of forest logging without permits as regulated in Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. Article 12 of Law Number 18 of 2013 explains several provisions governing legal subject actions in the context of preventing and eradicating forest destruction, such as allegedly carrying tools commonly used to cut down trees without permission. Where the actions regulated in Article 12 of Law Number 18 of 2013 can be carried out simultaneously. Several criminal acts can be referred to as a combination of acts regulated in Article 63, Article 64, and 65 of the Criminal Code which can be used to determine punishment for perpetrators of criminal acts that violate Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication. Forest Destruction.

Keyword: *Crime of Control of Forest Products, Without Permit, Concurrent Crimes*